

SOSIALISASI PENTINGNYA KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN BERBASIS GENDER DI KOTA SERANG

SYARKAWI¹, JAENUL², NOVI WULANDARI³, LINDA FATMAWATI⁴, MASRIPA⁵

Universitas Pamulang^{1,2,3,4,5}

Email: dosen03005@unpam.ac.id¹

Abstract: *Waste management has become a critical and pressing issue faced by many cities in Indonesia, including Serang City. Household waste continues to increase over time and remains inadequately processed. In this context, women as household managers hold a significant role that is often overlooked in policy formulation. This Community Service Program (PKM) was designed to expand the understanding, involvement, and capacity of women in community-based waste management. The methods used included socialization, participatory discussions, and gender-based education aimed at increasing awareness, capacity, and women's engagement in sustainable waste practices. The results indicate that involving women can enhance collective awareness, reduce waste volume, and encourage sorting and reuse practices that support sustainable waste solutions.*

Keywords: *Waste management; Women; Community participation.*

Abstrak: Masalah pengelolaan sampah menjadi isu yang krusial dan mendesak yang dialami oleh banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Serang. Limbah rumah tangga yang terus meningkat belum diolah secara optimal. Dalam konteks ini, perempuan sebagai pengelola rumah tangga memiliki peran penting yang sering kurang diperhatikan dalam perumusan kebijakan. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang untuk memperluas pemahaman, keterlibatan, dan kapasitas perempuan dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, diskusi partisipatif, dan edukasi berbasis gender untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelibatan perempuan dapat meningkatkan kesadaran kolektif, mengurangi volume sampah, serta mendorong praktik pemilahan dan pemanfaatan sampah yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pengelolaan sampah; Perempuan; Partisipasi masyarakat.

A. Pendahuluan

Permasalahan sampah di Kota Serang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk di Kota Serang terus bertambah, yang berdampak langsung pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang (2020), produksi sampah harian mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 800 ton per hari. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 400 ton yang dapat diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara produksi sampah dan kapasitas penanganannya.

Keterbatasan armada pengangkut sampah menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. Banyaknya armada yang tidak memadai dan sering kali mengalami kerusakan menghambat proses pengangkutan sampah dari berbagai titik pengumpulan menuju TPAS. Misalnya, di beberapa kawasan padat penduduk, seperti Kelurahan Kasemen dan Cipocok Jaya, sering kali terlihat tumpukan sampah yang menggunung di pinggir jalan. Situasi ini tidak hanya menciptakan pemandangan yang tidak sedap dipandang, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, seperti penyebaran penyakit akibat timbunan sampah yang tidak terkelola dengan baik.

Selain itu, kapasitas TPAS Cilowong yang hampir penuh juga memperburuk situasi ini. Dengan semakin sedikitnya ruang untuk menampung sampah yang masuk, pihak pengelola TPAS terpaksa melakukan pembatasan terhadap jumlah sampah yang diterima. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah di lokasi-lokasi lain, yang pada gilirannya menambah beban bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Misalnya, di beberapa titik, warga terpaksa membakar sampah mereka sendiri sebagai solusi sementara, yang justru menimbulkan polusi udara dan masalah lingkungan lainnya.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menangani masalah sampah sering kali menghadapi kendala dalam implementasi. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya anggaran yang memadai. Banyak program pengelolaan sampah yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan dana. Selain itu, koordinasi antar instansi yang sering kali kurang baik juga menjadi penghambat. Misalnya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya perlu bekerja sama secara sinergis untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat tumpang tindih tugas dan tanggung jawab yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan program-program pengelolaan sampah.

Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih baik. Edukasi tentang pentingnya pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah harus ditingkatkan. Misalnya, program-program pelatihan dan sosialisasi yang melibatkan komunitas lokal dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan mereka dapat berkontribusi dalam mengurangi volume sampah yang dihasilkan dan mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif. Data menunjukkan bahwa produksi sampah mengalami peningkatan setiap tahunnya:

Table 1. Peningkatan Sampah di Kota Serang dari Tahun 2017-2020

Tahun	Produksi Sampah (ton/hari)	Sampah Terangkut (ton/hari)	Persentase Terangkut (%)
2017	1666	620	37.2
2018	1684	875	51.96
2019	1702	1011	59.40
2020	1622	886	54.62

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa produksi sampah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini merupakan isu yang semakin mendesak, terutama di kota-kota besar seperti Kota Serang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, kita dapat melihat tren yang mengkhawatirkan dalam hal pengelolaan sampah.

Melalui tabel yang disajikan, kita dapat mengamati bahwa pada tahun 2017, produksi sampah di Kota Serang mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 1666 ton per hari. Dari jumlah tersebut, hanya 620 ton yang berhasil diangkut, sehingga persentase sampah yang terangkut hanya mencapai 37,2%. Angka ini sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa lebih dari 60% sampah yang dihasilkan tidak terkelola dengan baik. Situasi ini tidak hanya menimbulkan masalah estetika yang mencolok, seperti pemandangan kumuh dan bau tidak sedap, tetapi juga berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Sampah yang menumpuk dapat menjadi sarang penyakit, menarik perhatian hewan pengerat dan serangga, yang pada gilirannya dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Misalnya, di daerah yang banyak sampah, kita sering menemukan peningkatan kasus demam berdarah, yang disebabkan oleh nyamuk yang berkembang biak di genangan air yang tercemar.

Ketika kita melangkah ke tahun berikutnya, yaitu 2018, produksi sampah meningkat sedikit menjadi 1684 ton per hari. Namun, ada peningkatan signifikan dalam jumlah sampah yang terangkut, yaitu mencapai 875 ton, sehingga persentase terangkut melonjak menjadi 51,96%. Meskipun ada perbaikan yang menggembirakan ini, angka tersebut masih menunjukkan bahwa hampir setengah dari sampah yang dihasilkan tetap tidak terkelola dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Salah satu tantangan utama adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Misalnya, banyak warga yang masih membuang sampah sembarangan, yang pada akhirnya berkontribusi pada penumpukan sampah di jalanan dan lingkungan sekitar.

Pada tahun 2019, kita melihat kembali peningkatan dalam produksi sampah, yang mencapai 1702 ton per hari. Jumlah sampah yang terangkut juga menunjukkan kemajuan, mencapai 1011 ton, dengan persentase terangkut sebesar 59,40%. Ini adalah perkembangan yang positif dan menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam pengelolaan sampah. Namun, tetap saja, lebih dari 40% sampah

masih tidak terkelola dengan baik. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada kemajuan, sistem pengelolaan sampah di Kota Serang masih memerlukan perbaikan yang signifikan. Misalnya, perlu adanya peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti penambahan tempat sampah di area publik dan pengembangan fasilitas daur ulang yang lebih efisien.

Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan dalam produksi sampah menjadi 1622 ton per hari. Sayangnya, jumlah sampah yang terangkut juga mengalami penurunan menjadi 886 ton, dengan persentase terangkut sebesar 54,62%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan perilaku masyarakat, kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya efektif, atau bahkan dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pola konsumsi dan produksi sampah. Misalnya, selama pandemi, banyak bisnis tutup dan aktivitas masyarakat berkurang, yang berpotensi mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Namun, di sisi lain, peningkatan penggunaan kemasan sekali pakai untuk makanan dan barang-barang kebutuhan sehari-hari selama pandemi juga dapat menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang sulit terkelola.

Menurut Juwandi et al. (2023), kebijakan pengelolaan sampah di Kota Serang masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dan rendahnya efisiensi dalam pengangkutan. Di sisi lain, studi oleh Mulyati et al. (2023) menyoroti bahwa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran lingkungan dan mendukung implementasi kebijakan pemerintah secara lebih efektif.

Masalah pengelolaan sampah ini tidak hanya berimplikasi pada lingkungan tetapi juga pada kesehatan masyarakat. Sampah yang tidak terkelola dengan baik berpotensi mencemari udara, air, dan tanah, sehingga meningkatkan risiko penyakit seperti diare dan infeksi saluran pernapasan (Saputra et al., 2023). Hal ini menandakan bahwa penanganan sampah harus menjadi prioritas dalam kebijakan lingkungan di Kota Serang.

Dalam konteks manajemen bencana dan lingkungan berbasis gender, perempuan memainkan peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan mitigasi dampak bencana lingkungan. Perempuan sering kali menjadi pengatur utama dalam aktivitas domestik, termasuk dalam hal pemilahan sampah dan pengelolaan limbah rumah tangga. Namun, meskipun peran ini sangat penting, kontribusi perempuan sering kali tidak diperhitungkan dalam kebijakan pengelolaan sampah yang formal. Hal ini mengakibatkan potensi mereka tidak diakui dan dimaksimalkan, sehingga mengurangi efektivitas program-program yang ada.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syarkawi & Maulana (2025), pendekatan berbasis gender dalam manajemen lingkungan terbukti dapat meningkatkan efektivitas program mitigasi bencana dan pengelolaan sampah. Pendekatan ini tidak hanya sekadar teori, tetapi juga sangat praktis dan relevan dalam konteks saat ini. Salah satu aspek penting dari pendekatan ini adalah penekanan pada peran perempuan dalam pengambilan keputusan, pelatihan pengelolaan sampah, dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Dalam banyak kasus, perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam terkait pengelolaan sumber daya lokal, sehingga keterlibatan mereka dapat memberikan perspektif yang lebih holistik. Contohnya, dalam program bank sampah, perempuan tidak hanya berperan sebagai pengumpul sampah tetapi juga sebagai pengelola yang dapat mengubah sampah organik menjadi kompos berkualitas tinggi. Proses ini tidak hanya mengurangi volume sampah yang dihasilkan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi keluarga mereka. Dengan menjual kompos atau produk daur ulang lainnya, perempuan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang melibatkan perempuan tidak hanya berkontribusi pada lingkungan, tetapi juga pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Namun, meskipun ada banyak bukti yang menunjukkan manfaat dari pendekatan berbasis gender, tantangan yang dihadapi tetap signifikan. Sering kali, kebijakan yang ada tidak mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif perempuan. Misalnya, dalam banyak kebijakan pengelolaan sampah, tidak ada ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah. Ketidakadilan ini mengakibatkan kurangnya dukungan untuk inisiatif yang dipimpin oleh perempuan dan membuat mereka sulit untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program-program tersebut. Hal ini menciptakan siklus di mana perempuan tetap terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Untuk mengatasi tantangan ini, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk mendengarkan suara perempuan dan melibatkan mereka dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi program. Misalnya, pemerintah daerah dapat mengadakan forum atau lokakarya yang melibatkan perempuan dalam diskusi mengenai pengelolaan sampah dan mitigasi bencana. Dengan cara ini, perempuan dapat menyampaikan pandangan dan kebutuhan mereka secara langsung, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini juga akan membantu menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan.

Lebih jauh lagi, dalam upaya menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dengan mempertimbangkan aspek gender. Melibatkan perempuan dalam pengelolaan sampah tidak hanya meningkatkan efektivitas program tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis gender, kita dapat menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan untuk tantangan lingkungan yang dihadapi saat ini.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah Kota Serang untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis gender dalam kebijakan dan program pengelolaan sampah guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya akan memberikan manfaat langsung bagi perempuan, tetapi juga akan membawa dampak positif bagi komunitas secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, keberhasilan program pengelolaan sampah yang inklusif akan menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan lingkungan di masa depan.

B. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam PKM ini adalah pembelajaran dengan mempersembahkan teori dan simulasi tentang Pentingnya Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Manajemen Lingkungan Berbasis Gender, kegiatan yang terdiri dari Tim PKM, Perwakilan Pemerintah Kota Serang, Pengurus dan Anggota Trash Ranger Banten, dan masyarakat serta mahasiswa/i Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Pamulang Serang. Selanjutnya, tim Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan pelatihan dan sosialisasi Pentingnya Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Manajemen Lingkungan Berbasis Gender.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema “Sosialisasi Pentingnya Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Manajemen Lingkungan Berbasis Gender di Kota Serang” dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sistematis yang dirancang untuk mencapai hasil yang optimal. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh kota-kota di seluruh dunia, termasuk Kota Serang. Dengan populasi yang terus meningkat dan aktivitas ekonomi yang semakin padat, masalah ini semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis gender menjadi penting, karena peran perempuan dalam pengelolaan sampah sering kali diabaikan.

Pengelolaan sampah di Kota Serang memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Edukasi dan sosialisasi yang efektif, pemberdayaan perempuan, peningkatan sarana dan prasarana, kolaborasi multipihak, serta integrasi kebijakan berbasis gender adalah langkah-langkah kunci yang perlu diambil untuk mengatasi tantangan ini. Dengan melibatkan semua pihak, kita dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, yang tidak hanya berfokus pada pengurangan dampak lingkungan, tetapi juga memberdayakan perempuan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Serang. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang meningkat, volume sampah yang dihasilkan juga meningkat secara signifikan. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, pada tahun 2022, total sampah yang dihasilkan mencapai sekitar 1.500 ton per hari, dengan hanya 60% yang berhasil dikelola secara efektif (Dinas Lingkungan

Hidup Kota Serang, 2022). Angka ini mencerminkan situasi yang memprihatinkan, di mana sisa sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, dan menimbulkan berbagai masalah sosial. Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah yang tidak hanya efektif tetapi juga mempertimbangkan perspektif gender.

Teori gender dalam pengelolaan lingkungan menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam sering kali dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang berkaitan dengan gender. Penelitian oleh Agarwal (2000) menunjukkan bahwa perempuan sering kali memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pengelolaan sumber daya lokal, tetapi sering kali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, dalam banyak komunitas, perempuan bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga, termasuk pengelolaan sampah domestik. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang jenis sampah yang dihasilkan dan cara terbaik untuk mengelolanya. Namun, ketika kebijakan pengelolaan sampah dirumuskan, suara mereka sering kali tidak didengar. Oleh karena itu, integrasi perspektif gender dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Serang menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan diakomodasi.

Selain itu, pendekatan berbasis gender dalam manajemen lingkungan dapat meningkatkan efektivitas program pengelolaan sampah. Menurut UN Women (2018), keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya lingkungan dapat meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program-program tersebut. Dalam konteks Kota Serang, perlu ada upaya untuk memberdayakan perempuan dalam pengelolaan sampah, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan. Misalnya, program pelatihan yang dirancang khusus untuk perempuan dapat membantu mereka memahami teknik pengelolaan sampah yang lebih baik, seperti metode daur ulang dan komposting. Dengan pengetahuan ini, perempuan tidak hanya dapat berkontribusi lebih besar dalam pengelolaan sampah, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan di komunitas mereka.



Gambar 1. Sosialisasi PKM
Sumber: Dokumentasi Tim PKM

Menerapkan perspektif gender dalam pengelolaan sampah juga berarti menciptakan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini bisa dilakukan dengan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari perempuan dari berbagai latar belakang, sehingga mereka dapat menyuarakan pendapat dan ide-ide mereka. Misalnya, di beberapa daerah, telah terbentuk kelompok perempuan yang fokus pada pengelolaan sampah yang berhasil menciptakan solusi inovatif untuk masalah sampah di lingkungan mereka. Dengan memberikan platform bagi perempuan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, kita tidak hanya memperkaya proses pengambilan keputusan, tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Di samping itu, penting juga untuk memperhatikan dampak sosial dari kebijakan pengelolaan sampah yang ada. Banyak perempuan, terutama di daerah pedesaan, terpengaruh oleh kebijakan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan peran mereka. Misalnya, jika sebuah kebijakan pengelolaan sampah lebih fokus pada solusi teknis tanpa melibatkan komunitas, maka perempuan yang biasanya

bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di rumah dapat merasa terpinggirkan. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang dampak sosial dari kebijakan pengelolaan sampah perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut inklusif dan adil.

Dalam rangka mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Serang, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah sangatlah penting. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sampah, sementara masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam program-program tersebut. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk masalah sampah di Kota Serang.

Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Sampah dan Manajemen Lingkungan

Pengelolaan sampah berbasis gender telah menjadi topik yang semakin relevan dalam kajian lingkungan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pengelolaan sampah bukan hanya sekadar masalah teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, terutama perempuan. Menurut M. M. Rahman (2019), pengelolaan sampah yang inklusif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas program pengelolaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan sering kali menjadi pengelola utama dalam keluarga terkait dengan pengelolaan sampah, meskipun mereka kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara kontribusi perempuan dan pengakuan terhadap peran mereka dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan.

Dalam konteks ini, teori ekologi feminis juga memberikan wawasan penting tentang hubungan antara gender dan lingkungan. Ecofeminism menekankan bahwa penindasan terhadap perempuan dan kerusakan lingkungan sering kali saling terkait (Plumwood, 1993). Misalnya, ketika perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan keputusan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh lingkungan yang mereka kelola. Dalam hal ini, kebijakan pengelolaan sampah yang tidak mempertimbangkan perspektif gender dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan lingkungan. Ketidakadilan ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi dalam akses terhadap pelatihan pengelolaan sampah, atau kurangnya representasi perempuan dalam forum-forum perencanaan lingkungan.

Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam sektor informal, termasuk dalam pengelolaan sampah, mencapai 60% di Kota Serang (BPS, 2021). Angka ini mencerminkan potensi besar untuk memberdayakan perempuan dalam program-program pengelolaan sampah. Namun, tantangan seperti kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Misalnya, tanpa pelatihan yang memadai, perempuan mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola sampah secara efektif, sehingga mengurangi dampak positif yang dapat mereka berikan. Oleh karena itu, penting untuk merancang program yang tidak hanya melibatkan perempuan tetapi juga memberikan mereka sumber daya dan pelatihan yang diperlukan untuk berkontribusi secara maksimal.

Kota Serang telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah. Salah satu kebijakan utama yang menjadi landasan dalam pengelolaan sampah adalah Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini tidak hanya menekankan pentingnya pengurangan dan pemilahan sampah, tetapi juga mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif dari warga. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kesadaran dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Namun, meskipun ada kerangka hukum yang jelas, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala yang perlu diatasi.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Menurut survei yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, hanya 40% masyarakat yang mengetahui tentang Perda tersebut dan cara pengelolaan sampah yang benar (Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2022). Angka ini mencerminkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan antara kebijakan yang telah ditetapkan dan pemahaman masyarakat yang masih minim. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih

lanjut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan perempuan yang sering kali bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di rumah tangga. Misalnya, dalam banyak keluarga, perempuan adalah pengambil keputusan utama dalam hal pengelolaan sampah domestik. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman mereka tentang pemilahan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan sangatlah penting.

Program-program yang melibatkan perempuan dalam pengelolaan sampah juga masih terbatas. Meskipun perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah, partisipasi mereka dalam program-program formal masih rendah. Menurut data dari BPS, hanya 25% perempuan yang terlibat dalam program pengelolaan sampah di tingkat komunitas (BPS, 2021). Data ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif yang mendorong partisipasi perempuan dalam program-program tersebut. Misalnya, pelatihan khusus yang dirancang untuk perempuan dalam pemilahan dan pengelolaan sampah dapat menjadi langkah awal yang efektif. Dengan melibatkan perempuan secara aktif, kita tidak hanya meningkatkan kapasitas mereka tetapi juga memperkuat peran mereka dalam menjaga lingkungan.

Contoh praktik baik dari daerah lain, seperti program bank sampah di Kota Bandung, dapat menjadi inspirasi bagi Kota Serang. Program tersebut berhasil melibatkan perempuan dalam pengelolaan sampah dan memberikan mereka pelatihan serta akses terhadap sumber daya. Hasilnya, tingkat pengumpulan sampah meningkat dan pendapatan keluarga juga bertambah (Bandung Environmental Agency, 2021). Dalam program ini, perempuan tidak hanya diajarkan cara mengelola sampah, tetapi juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah yang dihasilkan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi keluarga.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Serang, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis gender. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pengelolaan sampah, tetapi juga memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga swasta, hingga organisasi masyarakat sipil, untuk bersama-sama menciptakan program yang berkelanjutan dan berdampak positif. Dengan sinergi yang kuat antara berbagai elemen masyarakat, kita dapat berharap untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Serang.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun terdapat kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah berbasis gender di Kota Serang, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal pendanaan dan sumber daya. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, program-program pengelolaan sampah yang melibatkan perempuan tidak dapat berjalan dengan optimal. Misalnya, banyak inisiatif yang terpaksa dibatalkan atau mengalami penundaan karena keterbatasan dana. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa dukungan finansial tidak hanya mencakup dana untuk pelatihan, tetapi juga untuk penyediaan infrastruktur yang diperlukan, seperti tempat pengolahan sampah dan fasilitas pendukung lainnya.

Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi perempuan mengenai pengelolaan sampah juga menjadi hambatan signifikan. Banyak perempuan yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk terlibat dalam program-program pengelolaan sampah secara efektif. Menurut penelitian oleh Nurhayati (2020), hanya 30% perempuan yang mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan sampah, sementara sisanya masih bergantung pada pengetahuan tradisional yang sering kali tidak efektif. Pengetahuan yang terbatas ini tidak hanya menghambat partisipasi aktif perempuan, tetapi juga dapat mengakibatkan pengelolaan sampah yang tidak efisien. Sebagai contoh, di beberapa daerah, perempuan yang terlibat dalam pengelolaan sampah sering kali tidak mengetahui teknik pemilahan yang benar, sehingga banyak sampah yang seharusnya dapat didaur ulang justru terbuang sia-sia.

Manajemen lingkungan berbasis gender adalah pendekatan yang mendalam dan komprehensif, yang tidak hanya mempertimbangkan peran dan tanggung jawab gender dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana perbedaan gender dapat

memengaruhi pola konsumsi dan produksi sampah. Di Kota Serang, pemahaman yang mendalam tentang pengaruh gender dalam konteks ini sangat krusial, mengingat tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2021) menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki kepedulian yang lebih besar terhadap lingkungan dibandingkan laki-laki. Mereka lebih aktif dalam upaya pengelolaan sampah, baik melalui kegiatan sehari-hari maupun dalam inisiatif komunitas. Misalnya, perempuan sering kali menjadi penggerak utama dalam program daur ulang di lingkungan mereka, menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi besar dalam mengatasi masalah lingkungan.



Gambar 2. Diskusi bersama Wakil Walikota Serang
Sumber: Dokumentasi Tim PKM

Namun, meskipun perempuan memiliki motivasi yang kuat, sering kali mereka menghadapi keterbatasan yang signifikan. Akses yang terbatas terhadap informasi dan sumber daya menjadi penghalang besar bagi partisipasi aktif mereka. Banyak perempuan di Kota Serang, khususnya yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung, tidak memiliki akses ke pelatihan atau informasi yang diperlukan untuk mengelola sampah dengan efektif. Dalam konteks ini, pendidikan dan pelatihan berbasis gender menjadi salah satu strategi yang sangat diperlukan. Menurut penelitian oleh Dewi dan Santosa (2022), program pelatihan yang melibatkan perempuan dalam pengelolaan sampah tidak hanya meningkatkan kesadaran mereka tentang isu-isu lingkungan, tetapi juga memberikan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di beberapa komunitas di Jakarta, perempuan yang telah dilatih dalam pemilahan dan pengolahan sampah berhasil menciptakan usaha daur ulang yang tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memberikan sumber pendapatan tambahan bagi keluarga mereka.

Pendidikan berbasis gender tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengelolaan sampah, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Penelitian oleh UN Environment (2021) menunjukkan bahwa ketika perempuan dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan, hasil yang dicapai cenderung lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan membawa perspektif dan pengalaman yang berbeda, yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Kota Serang perlu menciptakan platform yang memungkinkan perempuan untuk berbagi ide dan berkontribusi dalam kebijakan lingkungan. Misalnya, forum komunitas atau kelompok diskusi yang melibatkan perempuan dari berbagai latar belakang dapat menjadi sarana efektif untuk mengumpulkan ide-ide inovatif dan solusi yang relevan.

Selanjutnya, penting untuk memahami bahwa pemberdayaan perempuan dalam konteks manajemen lingkungan tidak hanya memberi manfaat bagi mereka secara individu, tetapi juga berdampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Ketika perempuan diberdayakan dan diberikan kesempatan untuk berkontribusi, mereka tidak hanya mengelola sampah dengan lebih baik, tetapi juga mengedukasi anggota keluarga dan komunitas mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ini menciptakan efek domino yang dapat meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat luas. Selain itu, program-program yang mendukung pengelolaan sampah

berbasis gender dapat memperkuat jaringan sosial di antara perempuan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketahanan komunitas terhadap tantangan lingkungan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan untuk meningkatkan pengelolaan sampah berbasis gender di Kota Serang. Pertama, perlu ada peningkatan anggaran untuk program pengelolaan sampah yang melibatkan perempuan. Dengan anggaran yang memadai, pemerintah dapat menyediakan pelatihan, sumber daya, dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung partisipasi perempuan dalam program-program tersebut. Misalnya, alokasi dana khusus untuk program pelatihan yang berfokus pada teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dapat memberdayakan perempuan untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, pengadaan alat dan infrastruktur yang mendukung seperti tempat sampah terpisah dan fasilitas daur ulang yang mudah diakses dapat meningkatkan efektivitas program ini.

Kedua, sosialisasi dan pendidikan mengenai pengelolaan sampah harus diperluas, terutama di kalangan perempuan. Program-program pelatihan yang melibatkan perempuan sebagai instruktur dapat menjadi strategi yang efektif. Menurut penelitian oleh Setiawan (2022), pelatihan yang melibatkan perempuan sebagai pengajar dapat meningkatkan partisipasi perempuan hingga 50% dalam program pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat menginspirasi komunitas mereka. Misalnya, dengan melibatkan perempuan dalam kampanye kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah, mereka dapat lebih mudah menyampaikan pesan kepada sesama perempuan di lingkungan mereka, yang seringkali lebih akrab dengan isu-isu domestik dan lingkungan.

Ketiga, perlu ada kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum atau kelompok kerja yang melibatkan perempuan dari berbagai latar belakang. Dengan demikian, suara perempuan dapat didengar dan diakomodasi dalam kebijakan pengelolaan sampah. Contohnya, forum tersebut dapat terdiri dari perwakilan perempuan dari komunitas, organisasi non-pemerintah, dan akademisi yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan. Melalui diskusi dan dialog yang konstruktif, kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi perempuan di masyarakat.

Keempat, pemerintah daerah juga perlu menjalin kemitraan dengan LSM dan sektor swasta untuk meningkatkan dukungan terhadap program pengelolaan sampah berbasis gender. Kolaborasi ini dapat menghasilkan inovasi dan sumber daya tambahan yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan program. Misalnya, LSM yang berfokus pada lingkungan dapat membantu dalam pelaksanaan program pelatihan dan sosialisasi, sementara sektor swasta dapat menyediakan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk pengelolaan sampah yang lebih efisien. Dengan membangun jaringan yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, Kota Serang dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berbasis gender.

Terakhir, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang berbasis gender. Dengan evaluasi yang sistematis, pemerintah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kebijakan yang ada, serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, data dan umpan balik dari masyarakat dapat digunakan untuk menilai efektivitas program dan menentukan area yang perlu ditingkatkan. Dengan demikian, proses pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan Kota Serang dapat meningkatkan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan inklusif, serta memberdayakan perempuan dalam proses tersebut. Melalui pendekatan yang berbasis gender, pengelolaan sampah tidak hanya akan menjadi masalah teknis, tetapi juga sebuah upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan memberdayakan komunitas, terutama perempuan, dalam menjaga lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

D. Penutup

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Sosialisasi Pentingnya Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Manajemen Lingkungan Hidup Berbasis Gender di Kota Serang*” telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Sosialisasi ini juga berhasil menegaskan peran strategis perempuan dalam pengelolaan lingkungan rumah tangga serta pentingnya pelibatan aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pengelolaan sampah dan manajemen lingkungan di Kota Serang perlu mengintegrasikan perspektif gender untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sampah tidak hanya meningkatkan kesadaran lingkungan, tetapi juga memberdayakan mereka secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kota Serang untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan melibatkan perempuan dalam setiap tahap pengelolaan sampah

E. Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan rasa terima kasih yang kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam kesuksesan kegiatan ini. Khususnya Bapak Nur Agis Aulia, S.Sos Wakil Walikota Serang serta Bapak Imam Dr. Sofi'i, SE, S.Ag, M.Pd., selaku Direktur Universitas Pamulang Kota Serang, atas dukungan dan motivasi yang diberikan. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Zakaria Habib Al-Ra'Zie, S.IP., M.Sos, Ketua Program Studi Administrasi Negara, dan Ketua Trash Ranger Banten yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kami menyadari bahwa keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari kolaborasi dan partisipasi semua pihak, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berlangsung dan berkembang. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang positif dalam meningkatkan kesadaran kolektif serta memperkuat peran wanita dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana di masa depan.

Daftar Pustaka

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang (2020). Laporan Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah
- Juwandi, R., Sugiana, D., & Taufan, M. A. (2023). *Kebijakan Pemerintah Kota Serang dalam Pengelolaan Sampah*. Jurnal Kewarganegaraan, 7(2).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023). Laporan Statistik Pengelolaan Sampah Nasional.
- Mulyati, B., Ilmi, Y. F., & Basri, A. (2023). *Sosialisasi Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Peningkatan Peran Masyarakat*. Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(1).
- Saputra, D., et al. (2023). *Penggunaan Teknologi BSF dan Pirolisis dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan*. Jurnal Teknologi Lingkungan, 8(1).
- Syarkawi & Maulana, M.A. (2025). *Isu Gender Dalam Manajemen Bencana dan Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Ensiklopedia Social Review, (7) (1)
- World Bank. (2021). *Public-Private Partnership in Waste Management: A Case Study Approach*.
- Agarwal, B. (2000). *Conceptualizing Gender in Environmental Politics*. *Environmental Politics*, 9(2), 1-19.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Gender Kota Serang*. Jakarta: BPS.
- Bandung Environmental Agency. (2021). *Laporan Program Bank Sampah*. Bandung: BPLH.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. (2022). *Laporan Tahunan Pengelolaan Sampah*. Serang: DLH.
- Nurhayati, D. (2020). *Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Serang*. Jurnal Lingkungan, 15(1), 45-60.
- Setiawan, A. (2022). *Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Pengelolaan Sampah*. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 10(2), 75-90.
- UN Women. (2018). *Gender and Environment*. New York: UN Women.
- Widyastuti, R. (2021). *Ketidakadilan Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jurnal Sosial dan Politik, 8(3), 123-135.

Yogyakarta Environmental Agency. (2020). *Laporan Program Pengelolaan Sampah*. Yogyakarta: YEA.